

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang masih di hadapi oleh negara Indonesia. Kondisi ini masih sangat kompleks dan multidimensional, sehingga upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah telah menginisiasi berbagai program, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), untuk membantu meringankan beban rumah tangga miskin dalam jangka pendek. Secara garis besar, strategi pengentasan kemiskinan meliputi dua pendekatan utama. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar mereka memiliki keterampilan dan sumber daya untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru. Semua langkah ini diarahkan untuk mewujudkan cita-cita nasional yaitu terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur. (Royat, 2015).

Badan Pusat Statistik (2016), secara operasional mendefinisikan kemiskinan juga sebagai ketidakmampuan ekonomi suatu rumah tangga, memenuhi kebutuhan dasar baik pangan maupun *non* pangan, yang dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran. Dengan kata lain, seseorang dianggap miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita perbulan berada dibawah garis kemiskinan, mencakup belanja makanan serta kebutuhan *non* pangan. Dalam pengertian ini penduduk miskin adalah mereka yang karena keterbatasan daya

beli, hidup kondisi kekurangan sehingga tidak dapat mencukupi segala kebutuhan dasarnya. Sebaliknya, jika seseorang mampu memenuhi standar pengeluaran minimum untuk pangan maupun *non* pangan, maka ia tidak termasuk dalam kategori miskin menurut BPS.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia juga telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ishak dan Kartiasih (2022) menyatakan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan-TIK serta meningkatnya pengguna ponsel secara nyata berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa pemanfaatan TIK secara optimal dapat dijadikan strategi penting dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Pendidikan juga memegang peranan sentral dalam menekan kemiskinan. Priseptian (2022) mengungkapkan bahwa pendidikan berkualitas menjadi fondasi utama untuk membentuk masa depan suatu bangsa, karena kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan itu sendiri. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan mendorong pembangunan sektor pendidikan. Indikator seperti tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah menjadi ukuran penting dalam menilai kemajuan pendidikan. Menurut Todaro dan Smith (2018) berpendapat bahwa peningkatan dua aspek tersebut dapat membantu menurunkan angka kemiskinan.

Sementara itu angka pengangguran tetap menjadi tantangan serius yang berdampak langsung terhadap meningkatnya kemiskinan. Berdasarkan

penelitian Sari *et al.* (2024), di Provinsi Jambi, pengangguran terbuka menunjukkan bahwa yang signifikan dan positif terhadap kemiskinan, yang berarti bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan faktor kunci dalam menekan angka kemiskinan.

Tabel 1. 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

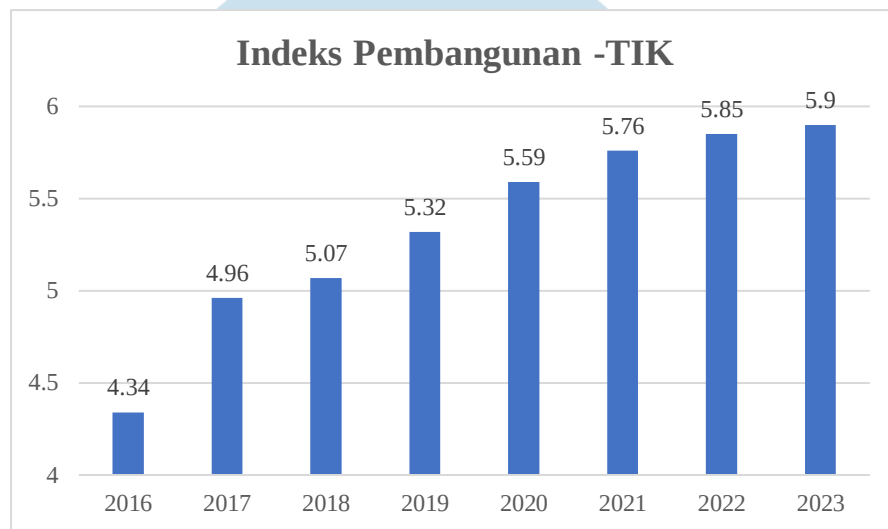
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	17.278,68	10,7
2017	26.582,99	10,12
2018	26.674,58	9,66
2019	24.785,87	9,22
2020	27.549,69	10,19
2021	26.503,65	9,71
2022	26.363,27	9,57
2023	25.898,55	9,36

Sumber: BPS, 2025

Menurut tabel 1.1 pada tahun 2016, angka kemiskinan absolut di Indonesia berada di kisaran 17,28 juta jiwa (10,70%). Setahun kemudian, jumlah ini melonjak drastis ke 26,58 juta pada 2017, meski persentase penduduk miskin hanya sedikit menurun menjadi 10,12%, yang artinya meski lebih banyak orang yang masuk kategori miskin, populasi nasional tumbuh lebih cepat sehingga, proporsi rumah tangga miskin relatif sedikit menurun.

Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2018-2023 sekitar 26,7 juta jiwa dengan persentase 9,66%, dimana angka kemiskinan mulai menyusut hingga 24,79 juta jiwa (9,22%) pada tahun 2019, yang mencerminkan keberhasilan program pengentasan dan kondisi ekonomi yang membaik

sebelum pandemi. Namun pada tahun 2020, tekanan akibat *Covid-19* mengembalikan jumlah warga miskin ke level tertinggi periode ini (27,55 juta jiwa atau 10,19%). Sejak tahun 2021, pemulihan ekonomi dan dukungan sosial seperti bansos, kartu prakerja, dan stimulus untuk UMKM mendorong penurunan bertahap menjadi 26,50 juta (9,71%) pada tahun 2021. 26,36 juta (9,57%) pada tahun 2022. Dan 25,90 juta jiwa (9,36%) di tahun 2023



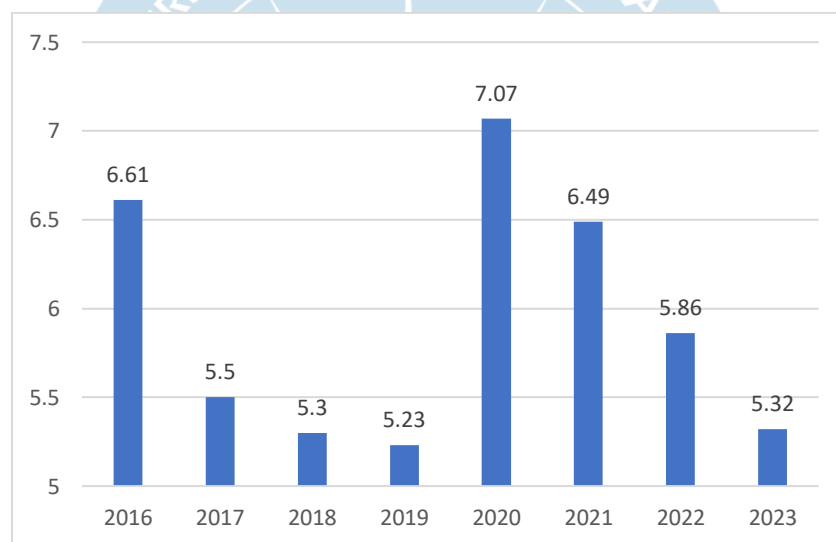
Sumber : BPS, 2025

Gambar 1.1

Indeks Pembangunan-TIK menurut Provinsi di Indonesia

Gambar diatas menggambarkan tren Indeks Pembangunan-TIK di Indonesia selama periode 2016-2023. Terlihat adanya pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun, di mana indeks meningkat dari 4,34 pada tahun 2016 menjadi 5,90 pada tahun 2023. Agustina dan Pramana (2019) mengatakan bahwa, pembangunan TIK dan pengeluaran pemerintah di bidang TIK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada penelitian tersebut ditemukan adanya ketimpangan/gap yang sangat besar

pada pembangunan TIK antara provinsi-provinsi di Indonesia. Dikatakan bahwa provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia seperti NTT dan Papua lambat dan sangat tertinggal dalam pembangunan TIK. Perkembangan ini juga menjadi indikasi positif dan mendukung inovasi, efisiensi pelayanan publik, dan peningkatan daya saing nasional di era ekonomi digital. Dengan pertumbuhan tersebut, pemerintah diharapkan terus mengaselerasikan pembangunan TIK yang inklusif, merata dan berkelanjutan untuk mempecepat transformasi sosial-ekonomi.



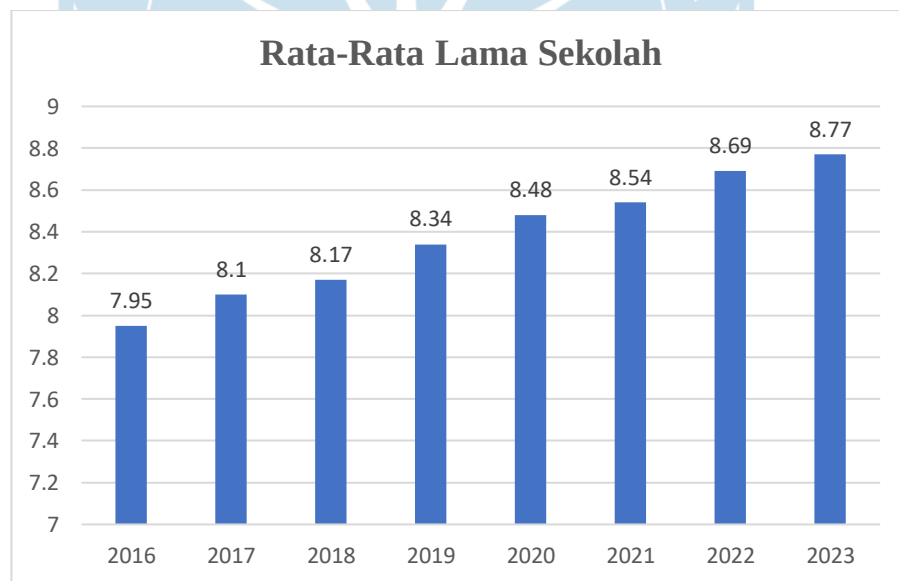
Sumber : BPS, 2025

Gambar 1. 2

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi

Pada gambar 1.2 menggambarkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia menunjukkan pola yang berfluktuasi sepanjang tahun 2016-2023. Pada awal periode yakni tahun 2016, tingkat pengangguran berada pada angka 6,61 persen dan mengalami penurunan bertahap hingga mencapai titik terendah sebesar 5,23 persen pada tahun 2019. Namun demikian, tahun 2020 mencatat

lonjakan tingkat pengangguran secara drastis menjadi 7,07 persen. Yang di perkirakan akibat adanya pandemi *Covid-19* terhadap sektor ketenagakerjaan. Selanjutnya terjadi tren penurunan kembali, masing-masing menjadi 5,32 persen pada tahun 2023. Agustina (2020) pada penelitiannya yang menunjukkan bahwa adanya pandemi *Covid-19* memunculkan krisis ekonomi di tahun 2020 perlu menjadi sebuah variabel yang diperlukan sebuah analisis lebih mendalam dalam rangka melihat faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun yang akan datang. Pola ini menggambarkan adanya proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi, meskipun tingkat pengangguran belum sepenuhnya pulih ke kondisi sebelum pandemi.

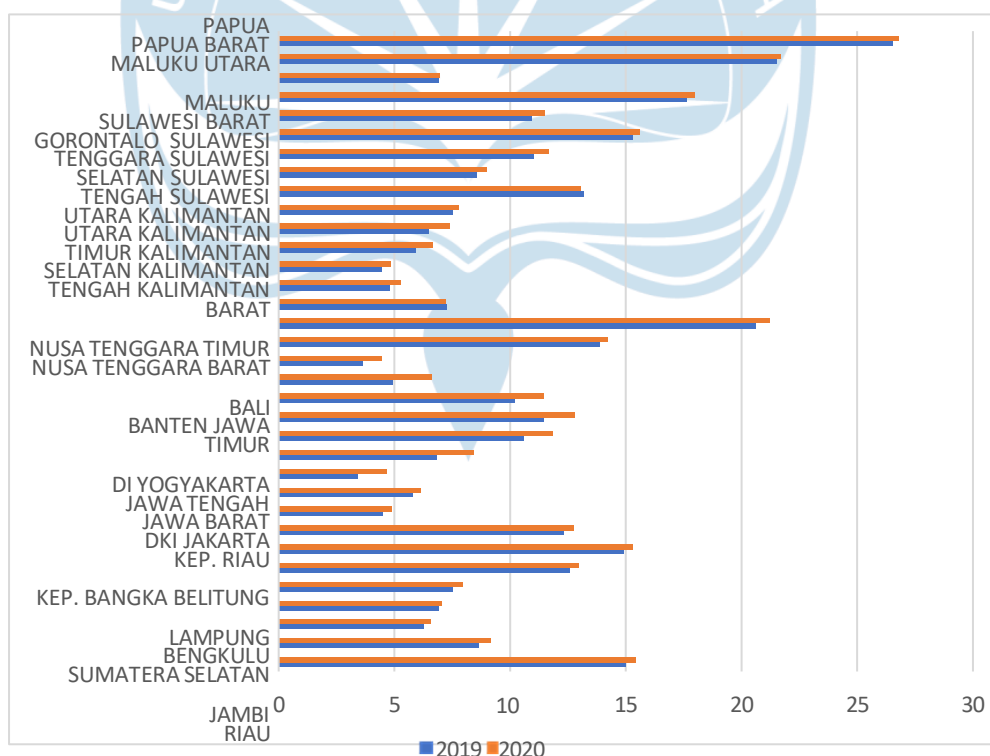


Sumber : BPS, 2025

Gambar 1. 3

Rata-Rata Lama Sekolah menurut Provinsi di Indonesia

Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2016-2023. Pada tahun 2016, rata-rata lama sekolah mencatat sebesar 7,95 dan terus meningkat hingga mencapai 8,77 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan di seluruh provinsi di Indonesia. Kenaikan yang relatif stabil setiap tahunnya mencerminkan program pembangunan sektor pendidikan, baik melalui penyediaan fasilitas pendidikan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal. Hal ini juga dapat menjadi indikator positif dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia nasional.



Sumber : BPS, 2020

Gambar 1. 4

Peresentase Kemiskinan di Indonesia menurut Provinsi

Dapat dilihat gambar 1.4 diatas menggambarkan perbandingan tingkat kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2020. Secara keseluruhan, terlihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin di besar provinsi pada tahun 2020 yang ditunjukkan dengan batang merah (2020) yang umumnya lebih panjang daripada batang biru (2019). Lonjakan angka kemiskinan ini diduga uat dipicu oleh dampak pandemic *Covid-19* yang mulai menyebar luas sejak tahun 2020, sehingga mengganggu roda perekonomian dan menyebabkan banyak masyarakat kehilangan sumber penghasilan. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi antara lain Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, yang konsisten terjadi pada kedua tahun tersebut. Sebaliknya di Jakarta, Bali dan Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah kondisi ini mencerminkan bahwa daerah dengan pembangunan dan akses ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan terendah.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa pendidikan, kondisi kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, serta efektivitas intervensi kebijakan publik yang merupakan elemen utama mempengaruhi tingkat kemiskinan. Menurut Zahra (2019), rendahnya mutu pendidikan dan buruknya kondisi kesehatan masyarakat turut memperbesar peluang terjadinya kemiskinan, karena dua faktor tersebut berkaitan langsung dengan rendahnya produktivias dan daya saing Angkatan kerja. Fenomena ini turut menjelaskan tingginya angka kemiskinan di wilayah seperti Papua dan Papua Barat. Ketidakseimbangan dalam distribusi kesempatan kerja juga menjadi faktor dominan. Pangestu, I. M., (2019), mencatat bahwa walaupun terjadi penurunan dalam tingkat pengangguran, banyak individu masih berada dalam

tingkat kemiskinan akibat pekerjaan yang tidak memberikan penghasilan memadai. Pekerja informal, contohnya kerap kali tidak memiliki perlindungan sosial dan kepastian pendapatan. Kondisi ini banyak ditemukan di provinsi-provinsi luar Jawa yang bertumpu pada sektor pertanian tradisional dan perikanan. Studi ini mengkaji apakah faktor-faktor berupa teknologi, informasi, pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dapat mempengaruhi persentase penduduk miskin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh TIK terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2023?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2023?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh TIK terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2023.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Dapat dijadikan sebagai acuan Pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dengan memperhatikan kondisi TIK, tingkat pengangguran, pendidikan di Indonesia.
2. Dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai pengaruh TIK, tingkat pengangguran, pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Penelitian ini berpotensi memberikan sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah ekonomi pembangunan serta studi kebijakan sosial. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan referensi ilmiah terkait keterkaitan antara TIK, tingkat pengangguran, pendidikan dan kemiskinan di Indonesia.

1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dan berbagai pertimbangan penelitian terdahulu serta teori yang ada, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga bahwa TIK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2023.

2. Diduga bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2023.
3. Diduga bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2023.

1.6 Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I – PENDAHULUAN

Bab I dalam penelitian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta hipotesis penelitian.

Bab II – TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menguraikan teori berdasarkan bukti empiris yang mendukung dengan topik penelitian. Meliputi Indeks Pembangunan-TIK, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dalam kaitanya dengan tingkat kemiskinan yang dilihat dalam persentase penduduk miskin.

Bab III – METODE PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini mencakup data dan sumber data yang digunakan, teknik analisis data, metode analisis data serta tahapan analisis data.

Bab IV – HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV memaparkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari tahapan analisis data menggunakan model dan alat analisis yang telah diestimasi.

Bab V – PENUTUP

Bab V merangkum kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan memberikan saran yang relevan dengan hasil penelitian ini.

